

SKRIPSI

**DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2020**

**(Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU dalam Mengatasi
Partisipasi yang Fluktuatif)**

disusun dan diajukan oleh:

**SALMI
E041181010**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2020**

**(Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU dalam Mengatasi
Partisipasi yang Fluktuatif)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik*

disusun dan diajukan oleh:

**SALMI
E041181010**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**“DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020”
(Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU Dalam
Mengatasi Partisipasi yang Fluktuatif)**

Yang diajukan Oleh:

SALMI

E041181010


Telah diperiksa dan diujikan:

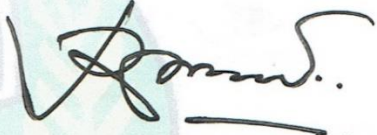
Makassar, 2022

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023


Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.,
NIP. 19680508202243001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**“DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020”
(Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU Dalam
Mengatasi Partisipasi yang Fluktuatif)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SALMI

E041181010

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Departemen Ilmu Politik

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., (.....)

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Salmi

NIM : E041181010

Program Studi :Ilmu Politik

Jenjang :S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020" (Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU Dalam Mengatasi Partisipasi Pemilih Yang Fluktuatif) " adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari di temukan sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 11 juli 2022

Yang menyatakan


Salmi

ABSTRAK

SALMI. NIM E041181010 “DINAMIKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020” (Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU Dalam Mengatasi Partisipasi Pemilih Yang Fluktuatif). Di Bimbing oleh Pembimbing I Andi Yakub dan Pembimbing II Muh. Imran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar dan untuk mengetahui hambatan yang dialami KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka.

Pada teknik wawancara, peneliti mewawancarai informan yang dapat memberikan penjelasan secara akurat dan pada teknik studi pustaka adalah melakukan pengumpulan data dengan tinjauan pustaka berupa sumber data, referensi-referensi atau dokumen-dokumen yang penting dan relevan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam hal mengatasi partisipasi pemilih yang fluktuatif sekaligus untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar. Adapun upaya-upaya yang dilakukan KPU yaitu Perekrutan penyelenggara anggota AdHoc dengan menggunakan sistem CAT, pendataan pemilih di damping aplikasi E-Coklit, merekrut anggota relawan demokrasi, Memaksimalkan kerja rantai SDM, melakukan sosialisasi berkelanjutan secara langsung dengan membuka ruang untuk setiap stakeholder masyarakat di Kota Makassar, memaksimalkan sosialisasi di media sosial dan mengait influencer Tumming-Abu.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut belum berjalan secara maksimal, ini dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami KPU Kota Makassar. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya kondisi covid dan cuaca buruk pada hari H pemilihan, protokol kesehatan dan ketakutan terhadap penyebaran covid-19, belum akuratnya data pemilih, aturan regulasi yang multi tafsir, keterlambatan pendistribusian C pemberitahuan. Dan terakhir masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih pada pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar tahun 2020.

Kata kunci: Partisipasi, pemilih, Makassar.

ABSTRACT

SALMI. NIM E041181010 "DYNAMICS OF VOTER PARTICIPATION IN THE 2020 MAKASSAR MAYORAL ELECTIONS AND W AKIL" (Study on Strengthening KPU Institutions in Overcoming Fluctuating Voter Participation). Guided by Guide I Andi Yakub and Guide II Muh. Imran.

This study aims to determine the efforts made by the KPU of Makassar city as an election organizer in increasing voter participation in the Makassar mayoral and deputy mayoral elections and to find out the obstacles experienced by the KPU as an election organizer in increasing voter participation. The research method used is a qualitative method with a descriptive type of research. Using in-depth interview data collection techniques and literature studies.

In the interview technique, researchers interview informants who can provide accurate explanations and in the literature study technique is to collect data with a literature review in the form of data sources, references or documents that are important and relevant to the research.

The results of the study show that the KPU of Makassar city has made various efforts in terms of overcoming fluctuating voter participation as well as to increase voter participation in the city of Makassar. The efforts made by the KPU are recruiting AdHoc members using the CAT system, collecting voter data accompanied by the E-Coklit application, recruiting democratic volunteer members, Maximizing the work of the HR chain, conducting sustainable socialization directly by opening up space for every community stakeholder in the city of Makassar, maximizing socialization on social media by hooking Tumming-Abu influencers.

Of the various efforts that have been made, it has not run optimally, this is due to the many obstacles experienced by the KPU in Makassar city. These barriers include covid condy and bad weather on the D-day of the election, health protocols and fears of the spread of covid-19 , inaccurate voter data, multi-interpretation regulatory rules, delays in distributing C notices. And finally, there is a lack of public awareness in voting in the 2020 Makassar mayoral and deputy mayoral elections.

Keywords:Participation, voter, Makassar.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana ilmu politik di Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca.

Perjalanan yang lumayan panjang telah penulis lalui dalam penyusunan dan perampungan penulisan skripsi ini. Banyak rintangan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat Rahmat-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk dapat menyempurnakan tulisan ini dan kiranya dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya.

Penulis juga menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih

kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada kedua orang tua penulis bapak Sape dan ibu Hasmi atas segala cinta dan kasih syangnya yang tulus, yang senantiasa memberikan doa dan pengorbanan yang begitu besar yang tak dapat tergantikan dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya, hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual.

penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Penulis sangat menyadari selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali hambatan yang penulis alami. Namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Mantan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Periode 2022-2026 beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Suparman Abdullah, M.Si dan Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Bapak Haryanto, S.IP, M.A, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Kepada saudara saudariku Revolusi18. Terima kasih telah menjadi sudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. kepada kak Muhammad Fichriyadi Hastira. Terimakasih karena selalu membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. kepada teman-teman terdekat penulis di kampus Azkia Aziza, Fitriani, Vina, Nurulmutya Yunus, Sri Widyawati Ahmad, Indah Sari, Karina, Pirda, Uppa, Badaria, Rahma, Kurni, Nasram, Tina, Dewi, Evi. Terimakasih karena kalian sudah banyak membantu penulis dalam perampungan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN gelombang 106 Barru 2. Terimakasih karena kalian sudah banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman di luar kampus terutama Dadda, Asri, Hera, Siska, Nihla, Hasliati, Rendi, Wandu. Terimakasih karena kalian

selalu memberi semangat dan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas waktu yang telah diluangkan dan atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Makassar, Juli 2022

Salmi

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pendekatan institusional baru	11
2.3 Konsep Demokrasi Elektoral	16
2.4 Konsep Partisipasi Politik	18
2.4.1 Pengertian Partisipasi Politik	18
2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	20
2.5 Kerangka Pemikiran	21
2.6 Skema Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	23
3.3 Jenis Dan Sumber Data	24
3.3 Informan Penelitian	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
4.1 Makassar.....	29
4.1.1 Jumlah penduduk di Kota Makassar	30
4.2 KPU	31
4.2.1 Jumlah daftar pemilih tetap di Kota Makassar	32
4.2.2 Jumlah yang menggunakan hak pilih di Kota Makassar.....	33

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
5.1 Upaya peningkatan partisipasi pemilih di Kota Makassar	34
5.1.1 Perekrutan penyelenggara Ad Hoc dengan menggunakan sistem CAT.....	35
5.1.2 Pendataan pemilih dengan didampingi aplikasi E-coklit.....	40
5.1.3 Merekrut anggota relawan demokrasi (Relasi).....	42
5.1.4 Memaksimalkan kerja rantai SDM.....	45
5.1.5 Sosialisasi media offline dan media online	48
5.2 hambatan peningkatan partisipasi pemilih di Kota Makassar .	56
5.2.1 covid dan cuaca buruk pada hari H pemilihan.....	56
5.2.2 data pemilih belum akurat	58
5.2.3 Protokol kesehatan dan ketakutan terhadap penyebaran covid-19.....	60
5.2.4 aturan regulasi yang multi tafsir	62
5.2.5 keterlambatan pendistribusian C pemberitahuan	66
5.2.6 kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemilihan.....	67
BAB VI PENUTUP.....	72
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Sulawesi Selatan	3
Tabel 2	Data partisipasi pemilih Pada pemilihan Walikota Makassar dari Tahun 2013-2020.....	4
Tabel 3	Data informan elemen KPU	25
Tabel 4	Data informan masyarakat	26
Tabel 5	Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Makassar	30
Tabel 6	Jumlah data pemilih berdasarkan kecamatan di Kota Makassar	32
Tabel 7	Jumlah daftar pengguna hak pilih berdasarkan kecamatan di Kota Makassar	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan, karena pemilihan umum merupakan pilar utama dari demokrasi. Oleh karena itu demokrasi melalui kegiatan pemilu mensyaratkan warga negara untuk ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi.

Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama. Akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi mulai banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum termasuk di dalamnya ikut menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilu.¹

Partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen, merupakan indikator keberhasilan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu aspek penting demokrasi. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga

¹ Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008 Hal. 367.

negara berhak ikutserta menentukan isi keputusan politik.² Partisipasi dalam sebuah pemilu itu juga dianggap sangat penting, karena tingginya tingkat partisipasi bisa menunjukkan atau memberi gambaran bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap kenegaraan, pembangunan politik, dan kebijakan publik dengan mengikuti dan memahami masalah politik dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik ini.

Partisipasi politik yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilu memiliki makna yang sangat penting sebagai penggerak roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan sistem kenegaraan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan bahkan bisa jadi tidak berarti.

Dewasa ini partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia terkhusus pada pilkada serentak tingkat Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan mengalami pergerakan yang fluktuatif. Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pilkada serentak, dan berikut ini data partisipasi masyarakat (pemilih) pada pilkada serentak 2010-2020 yakni:

² Mohammad Mulyadi. Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019. INFO SINGKAT. Vol.XI. No.09/1/Puslit/Mei/ 2019. Hal.3-4

Tabel 1
Data Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Sulawesi Selatan

NO	Kabupaten	Pilkada serentak 2010	Pilkada serentak 2015	Pilkada serentak 2020
1.	Kep. Selayar	82,28	81,22	83,80
2.	Bulukumba	68,42	58,92	74,25
3.	Gowa	74,71	67,75	77,04
4.	Pangkajene dan kep	78,28	72,21	83,29
5.	Maros	75,20	61,51	82,30
6.	Barru	77,88	77,53	81,03
7.	Soppeng	76,21	77,75	76,00
8.	Tana Toraja	78,87	71,82	72,13
9.	Toraja Utara	74,78	72,06	82,28
10.	Luwu Utara	78,27	76,43	81,23
11.	Luwu Timur	71,30	69,32	80,38

Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Data tersebut menunjukkan sejumlah daerah memiliki tingkat partisipasi yang bervariasi, ada yang meningkat, bahkan rata-rata mengalami penurunan. Misalnya Bulukumba, tingkat partisipasinya menurun sejak 2010 hingga 2015 begitupun dengan Maros, Gowa dan Luwu Timur serta Toraja Utara.

Kondisi ini tidak hanya berlangsung pada tahun 2015 saja akan tetapi pada Pilkada Serentak 2020 juga mengalami hal yang serupa pergerakan tingkat partisipasi pemilih di 12 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilu, beberapa kabupaten diantaranya mengalami peningkatan seperti kabupaten Barru, Gowa, Luwu Timur, Toraja Utara, Pangkep, Bulukumba, namun masih ada juga yang mengalami penurunan seperti Tana Toraja, dan kabupaten kabupaten Soppeng.

Secara umum pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan menunjukkan pergerakan tingkat partisipasi yang fluktuatif. Artinya ada beberapa kabupaten yang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 mengalami

penurunan angka partisipasi namun pada pilkada serentak 2020 kembali mengalami peningkatan begitupun sebaliknya ada kabupaten yang pada saat pelaksanaan pilkada serentak 2015 mengalami peningkatan angka partisipasi namun di pilkada serentak 2020 justru mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih.

Kondisi ini juga terjadi di Kota Makassar, pelaksanaan pilwali di Kota Makassar dari tahun 2013 sampai 2020 juga memperlihatkan pergerakan tingkat partisipasi yang fluktuatif. Pergerakan partisipasi pemilih di Kota Makassar dikatakan fluktuatif karena pada pelaksanaan Pilwali Makassar dari tahun 2013 sampai 2020 tingkat partisipasi pemilihnya tidak menunjukkan peningkatan ataupun penurunan secara signifikan. Akan tetapi justru menunjukkan angka partisipasi yang relatif tidak stabil terkadang mengalami penurunan atau sebaliknya.

Tabel 2
Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar dari Tahun 2013-2020

No.	PILWALI	DPT	PARTISIPAN	PERSENTASE
1.	2013	988.208	592.299	59,94
2.	2018	990.836	584.406	58,98
3.	2020	901.087	537.585	59,66

Sumber KPU Kota Makassar

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 dari daftar jumlah pemilih tetap sebanyak 988.208 yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 592.299. atau jika dipresentasikan hanya sebesar 59,94%. Kemudian pada tahun 2018 daftar jumlah pemilih tetap 990.836 dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 584.406 sekitar 58,98%. Persentase jumlah partisipasi dari tahun 2013 ke 2018 mengalami sedikit tingkat

partisipasi pemilih. Akan tetapi pada pelaksanaan Pilwali di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilwali di tahun 2018, dimana tingkat partisipasi pemilih di tahun 2020 ini sebesar 59,66%.

Melihat kondisi yang demikian itu tentunya KPU Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. KPU membuka ruang bersama para stakeholder untuk mengajak para masyarakat datang ke TPS. Upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan melakukan kunjungan pada lembaga-lembaga melakukan sosialisasi untuk mengajak para masyarakat turut berpartisipasi pada pemilihan. KPU juga selalu menekankan kepada masyarakat Kota Makassar bahwa memilih merupakan hak dan kewajiban masyarakat.³

Meskipun KPU Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih namun hasil yang ditunjukkan belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan melihat pergerakan tingkat partisipasi di Kota Makassar yang masih dalam posisi yang fluktuatif. Berdasar atas beberapa fakta dan realitas yang terjadi, kondisi ini kemudian menjadi menarik untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar dan apa yang mejadi penghambat KPU Kota Makassar dalam mengatasi partisipasi yang fluktuatif.

³ Nur Fitriani, Peningkatan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. Skripsi Universitas Hasanuddin 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar?
2. Apa hambatan KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar.
2. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui hambatan yang dialami KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama yaitu:

Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau bahan referensi untuk bahan kajian lanjutan mengenai upaya dan hambatan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasi yang berarti dan berguna bagi dunia akademisi khususnya program studi ilmu politik mengenai upaya KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi masyarakat umum maupun civitas akademika yang akan melakukan penelitian selanjutnya di tempat lain terkait dengan topik yang penulis teliti.
2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Penelitian ini perlu mengungkapkan permasalahan secara komprehensif, maka dari itu penggunaan teori dan konsep akan menjadi alat analisis serta landasan berfikir bagi peneliti untuk membedah dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Berkenaan dengan itu, maka pada bagian akan membicarakan tentang kerangka teoritik dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini peneliti menguraikan pendekatan serta konsep yang berkaitan dengan “Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2020 (Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU Dalam Mengatasi Partisipasi Pemilih Yang Fluktuatif)”

2.1 Penelitian terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan dan dukungan saat menyusun karya tulis ini. Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Lestari yang berjudul “strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 di kabupaten pinrang”.⁴ penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana

⁴ Dewi Sri Lestari, 2019, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. hlm 64-65.

strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tahun 2018 di kabupaten pinrang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor penghambat sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam partisipasi politik.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai strategi komisi pemilihan umum kabupaten pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dilihat dari tiga indikator strategi yaitu pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan, pada tahap ini KPU kabupaten pinrang sudah berupaya maksimal melakukan sosialisasi beberapa segmen masyarakat dengan berbagai metode yang digunakan. Ketiga alokasi sumber daya, pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya. Adapun faktor yang berpengaruh sehingga pemilih pemula tidak ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pinrang yang dijelaskan dalam penelitian ini bahwa mereka tidak ikut memilih lantaran lebih mementingkan kesibukan sehari-hari, pengaruh keluarga dan perasaan tidak mampu.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. **Perbedaan** yaitu dari segi fokus penelitian disini fokus penelitiannya pada peningkatan partisipasi pemilih pemula di kabupaten pinrang sementara penelitian yang akan dilakukan penulis fokusnya pada

peningkatan partisipasi pemilih secara umum di Kota Makassar. kemudian perbedaan selanjutnya dari segi teori dan pendekatan yang digunakan dimana dalam penelitian ini menggunakan teori strategi untuk menganalisis permasalahan yang ada sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan Institusionalisme baru, konsep demokrasi elektoral dan partisipasi politik.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryono yang berjudul strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2015. dalam penelitian ini berupaya untuk mengungkap Strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini terkait strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 yaitu pertama Strategi Penguatan Kelembagaan yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU untuk memperkuat atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Strategi ini dalam penerapannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada Publik.

Kedua Strategi Sosialisasi Politik merupakan salah satu cara yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan metode sosialisasi tatap muka (*face to face*) dan melalui media. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan kelompok mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak, media massa dan media elektronik. Ketiga Strategi Pendidikan Pemilih Pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula, dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat, dengan Program *Training Of Trainer*.⁵

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. **Perbedaan** yaitu lokasi penelitian, kemudian dari segi teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan teori strategi dan metode analisis data dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. sementara penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan Institusionalisme baru, konsep demokrasi elektoral dan partisipasi politik dalam memecahkan persoalan sesuai dengan topik yang penulis angkat.

2.2 Pendekatan institusionalisme baru

Pendekatan ilmu politik dalam penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme baru, karena menurut Miriam Budiardjo pendekatan Institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi

⁵ Dwi Haryono, Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan

institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.⁶ Institusionalisme Baru merupakan penyimpangan dari Institusionalisme Lama. Institusionalisme Lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu Institusionalisme Baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Institusionalisme Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintahan sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya.

Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin
Sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam

⁶ Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. jurnal Administrative Reform, E-ISSN-2615-6709. vol.6 No2,(juni 2018). halaman 68-72.

mengejar proyek mereka masing-masing.

4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan Individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Adapun beberapa varian dari pendekatan Institusionalisme baru yaitu sebagai berikut:

1. Institusionalisme Rasional

Institusionalisme pilihan rasional berawal dari studi tentang perilaku kongres di Amerika, dimana terdapat perbedaan yang beragam dan tajam terhadap preferensi dan karakteristik legislator mengenai kebijakan. Tetapi meski terjadi perbedaan yang tajam, kongres masih menunjukkan situasi yang cukup stabil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan bagaimana institusi dengan perbedaan yang tajam masih dapat berjalan dengan stabil. Salah satu penjelasannya adalah adanya transaksi atau tawar-menawar di antara para legislator dalam perumusan atau kesepakatan terhadap kebijakan tersebut. Terdapat proses-proses politik berdasarkan pertimbangan untung-rugi untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama (Hall dan Taylor, 1996: 9). Institusionalisme pilihan rasional

melihat proses institusionalisasi dan relasi antar institusi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui pertimbangan-pertimbangan rasional dan untung rugi.⁷

2. Institusionalisme sosiologis

institusionalisme sosiologis menurut Peter A. Hall dan Rosemary memiliki tiga ciri yaitu mendefinisikan lembaga dengan sistem simbolis, kognitif dan moral serta makna. Kedua adalah memahami hubungan antar lembaga dan individu yang mengikuti pendekatan budaya. Ketiga adalah tentang citra diri dan identitas pelaku sosial.

3. Institusionalisme Historis

Institusionalisme Historis menjelaskan empat fitur yang relative khas. Pertama adalah kelembagaan historis cenderung untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara lembaga dan perilaku individu dalam istilah yang relatif luas. Kedua, mereka menekankan asimetri kekuasaan yang terkait dengan operasi dan pengembangan lembaga. Ketiga, mereka cenderung memiliki pandangan kelembagaan pembangunan yang menekankan ketergantungan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Keempat mereka sangat prihatin untuk mengintegrasikan analisis kelembagaan dengan jenis faktor kontribusi yang lain.⁸

⁷ Moh.Fajar Shodiq Ramadhan, Tri Hendra Wahyudi. 2016. Pembiaran pada potensi konflik dan kontestasi semu pemilukada kota blitar analisis institusionalisme pilihan rasional. ISSN 2477-8060. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPIDI> diakses pada tanggal 17 Januari 2022

⁸ Universitas Brawijaya, Inconsistency of Regulations Causes Small Parking Revenue Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir. Journal of Politics and Policy Volume 3, Number 1, December 2020)

4. Institusionalisme diskursif

Para pendukung institusionalisme diskursif, seperti Vivien Schmidt, menekankan bagaimana gagasan dan wacana mempengaruhi stabilitas dan perubahan kelembagaan.⁹ Institusionalisme baru yang terbaru, institusionalisme diskursif, memberikan wawasan tentang peran gagasan dan wacana dalam politik sambil memberikan pendekatan yang lebih dinamis terhadap perubahan institusional daripada tiga institusionalisme baru yang lebih tua. Ide adalah isi wacana yang substantif. Mereka ada di tiga tingkat kebijakan, program, dan filosofi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, kognitif dan normatif.

Wacana adalah proses interaktif menyampaikan ide-ide. Muncul dalam dua bentuk wacana koordinatif antar aktor kebijakan dan wacana komunikatif antara aktor politik dan publik. Bentuk-bentuk ini berbeda dalam dua konteks kelembagaan formal; pemerintahan sederhana memiliki wacana komunikatif yang lebih kuat dan pemerintahan majemuk memiliki wacana koordinatif yang lebih kuat. Lebih jauh lagi, institusi institusionalisme diskursif, bukanlah struktur eksternal- mengikuti aturan melainkan secara simultan struktur dan konstruksi internal untuk agen yang "latar belakang kemampuan ideasional" dalam "konteks makna" tertentu menjelaskan bagaimana lembaga diciptakan dan ada dan yang latar depan kemampuan diskursif, mengikuti logika komunikasi, menjelaskan

⁹ Schmidt, Vivien A. 2008. Institusionalisme Diskursif: Kekuatan Penjelasan Ide Dan Wacana. *Jurnal Review Tahunan Ilmu Politik*. ISSN 1094-2939

bagaimana institusi berubah atau bertahan. Minat adalah ide subjektif, yang meskipun nyata, tidak objektif atau material. Norma bersifat dinamis, konstruksi intersubjektif daripada struktur statis. Mengikuti logika komunikasi, jelaskan bagaimana institusi berubah atau bertahan.

Minat adalah ide subjektif, yang meskipun nyata, tidak objektif atau material. Norma bersifat dinamis, konstruksi intersubjektif daripada struktur statis. Mengikuti logika komunikasi, jelaskan bagaimana institusi berubah atau bertahan. Minat adalah ide subjektif, yang meskipun nyata, tidak objektif atau material. Norma bersifat dinamis, konstruksi intersubjektif daripada struktur statis.

2.3 Konsep Demokrasi Elektoral

Pengertian elektoral adalah pemilihan atau yang berkaitan dengan memilih. Elektoral dalam demokrasi dapat diartikan sebagai pemilihan umum (pemilu) yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memilih wakilnya di parlemen dan kepala pemerintahan. Demokrasi elektoral dapat dimaknai sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat.¹⁰

Demokrasi sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mungkin benar demokrasi bukanlah merupakan sistem yang sempurna, sering tidak efisien, banyak kelebihan

¹⁰ Kanal Informasi. 2019. Pengertian Elektoral Dalam Demokrasi. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-elektoral-dalam-demokrasi>

lainnya, namun keunggulannya adalah karena hanya dalam demokrasi lah semua kelemahan itu dapat dilontarkan untuk menemukan jalan pemecahan yang terbaik.¹¹ Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara Negara sumbernya adalah rakyat. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat pemerintah sebagai mandat dari rakyat. Jadi bagaimana masyarakat dikembangkan oleh pemerintahan negara adalah hak semua anggota masyarakat untuk menentukannya. Rakyat berhak mengangkat dan mengontrol pemerintah. Rakyat bukanlah sekadar alat legitimasi penguasa. Posisi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai obyek maupun subyek. Spirit demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” bukan hanya dijadikan jargon dimasa-masa pemilu semata.

Hak rakyat untuk memilih pemerintahnya melalui pemilihan umum yang periodik yang bebas dan adil diakui sebagai hak demokratis paling dasar. Perlindungan terhadap hak ini memerlukan pengakuan akan hak untuk memilih dan kebutuhan akan suatu sistem pemilihan yang inklusif, dan menghasilkan suatu perwakilan yang benar sesuai kehendak semua rakyat. Demokrasi elektoral bukanlah sekadar proses untuk memperoleh wakil rakyat atau seseorang menjadi pemimpin, tetapi demokrasi juga lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Demokrasi tentu saja tidak hanya berarti memilih seseorang untuk menjadi, melainkan juga untuk mencapai ataupun mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan bersama.

¹¹ Nyoman wiratmaja. Dilema Demokrasi Elektoral. Jurnal Bappeda Litbang. Vol.1. No.2 Agustus 2018.

Demokrasi elektoral adalah arena kompetisi dalam rangka memilih untuk mendapatkan seseorang yang mampu menjadi pemimpin dalam usaha mencapai ataupun mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukan hanya proses pelaksanaan demokrasi yang penting melainkan juga kualitas orang yang akan dipilih dan juga kiprahnya untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pemimpin yang bersaing maupun yang terpilih harus mampu menyeimbangkan antara dinamika keragaman demokrasi dengan keutuhan bangsa.¹²

Demokrasi adalah sebuah sistem yang berkembang dan dikembangkan bukan saja sebagai alat (instrumen) atau cara (ways) melainkan sekaligus merupakan tujuan (aims). Demokratisasi, karena itu, merupakan upaya mencapai kehidupan demokrasi melalui cara-cara demokratis. Demokrasi tidak dicapai melalui proses non-demokratis, dan penerapan cara-cara demokratis tidak senantiasa berjuang pada situasi demokratis. Sebagai sebuah tujuan, demokrasi diidealkan sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan kontrol rakyat (popular control) terhadap urusan publik (public affairs) atas dasar prinsip kesetaraan warga negara (equal rights).¹³

2.4 Konsep Partisipasi Politik

2.4.1 Pengertian Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi

¹² Ibid 1

¹³ Muhammad Habibi, Eko Priyo Purnomo. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perang Uang Dalam Demokrasi Elektoral Di Indonesia. 2017. hal.1.

mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.¹⁴

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu Ramlan Surbakti dalam bukunya "*memahami ilmu politik*" menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah Keikutsertaan warga negara biasa dalam meneruskan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.¹⁵

Adapun Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya "*Dasar-dasar ilmu politik*" mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai

¹⁴ Prof Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 367

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010). Hal. 184-185

atau salahsatu gerakan sosial dengan direct action, dan sebagainya.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidakefektif.

2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Dalam hal ini kesadaran politik yang dimaksud adalah kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilai seseorang terhadap pemerintah.¹⁶

Faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, seperti faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial yang dimaksud yaitu mengenai kedudukan seseorang dalam masyarakat karena pendidikan, pekerjaan. Sedangkan status ekonomi, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dinilai berdasarkan kekayaan. Selain itu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi

¹⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta:Grasindo, 2010).Hal.184-185

politik adalah kesadaran politik dan juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (sistem politik).

Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Dan kepercayaan kepada pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat menilai pemerintah dapat dipercaya dan tidak mudah dipengaruhi. Berdasarkan dari dua faktor faktor tinggi rendahnya partisipasi politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik akan cenderung pasif.

2.5 Kerangka pemikiran

Prinsip keterbukaan dan partisipasi merupakan persoalan inti bagi Komisi Pemilihan Umum terkhusus KPUD sekaligus menjadi jiwa atas proses terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang akuntabel, partisipatif, berintegritas, transparansi dan berjalan damai. Keterbukaan akan informasi kepemiluan mendorong partisipasi pada setiap proses berjalannya tahapan pemilu. Yakni, mendorong partisipasi politik masyarakat baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu, tentu bukanlah hal yang mudah. Partisipasi itu menjadi penting untuk menjadi tolak ukur kualitas Demokrasi dan kehidupan politik dalam masyarakat disetiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Pergerakan tingkat partisipasi pada pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar dari tahun 2013 sampai 2020 selalu menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, artinya bahwa KPU Kota Makassar Sebagai penyelenggara pemilu belum berhasil meningkatkan partisipasi pemilih secara terus menerus. Ada kalanya KPU justru mengalami penurunan angka partisipasi pemilih seperti yang terjadi di tahun 2018. Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana bentuk upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan institusionalisme baru.

2.6 Skema Berpikir

